



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2020.

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 101.589.236.000,00 (seratus satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disalurkan dari Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) berdasarkan usulan Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh Camat di sampaikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 45% (empat puluh lima persen).
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar permohonan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa dari Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa;
 - c. fotokopi rekening giro desa;
 - d. surat pernyataan bermaterai dari kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - e. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - f. fotokopi berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan oleh Camat.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar permohonan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa dari Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa;
 - c. fotokopi rekening giro desa;
 - d. surat pernyataan bermaterai dari kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa;

- e. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya; dan
- f. fotokopi berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan oleh Camat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 83 TAHUN 2019
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

| NO | KECAMATAN / DESA | BESARAN ADD TIAP DESA |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | KECAMATAN PONCOL | 3,901,842,900 |
| | 1. PONCOL | 572,204,100 |
| | 2. GONGGANG | 629,396,200 |
| | 3. JANGGAN | 509,622,100 |
| | 4. GENILANGIT | 577,676,800 |
| | 5. PLANGKRONGAN | 566,437,800 |
| | 6. CILENG | 561,625,500 |
| | 7. SOMBO | 484,880,400 |
| II | KECAMATAN PARANG | 6,383,116,000 |
| | 1. SAYUTAN | 567,483,600 |
| | 2. NGLOPANG | 506,212,600 |
| | 3. MATEGAL | 546,564,300 |
| | 4. BUNGKUK | 475,875,800 |
| | 5. TROSONO | 555,184,800 |
| | 6. NGUNUT | 521,182,000 |
| | 7. NGAGLIK | 566,336,200 |
| | 8. TAMANARUM | 540,962,200 |
| | 9. PRAGAK | 539,643,900 |
| | 10. SUNDUL | 510,232,600 |
| | 11. JOKETRO | 533,793,800 |
| | 12. KRAJAN | 519,644,200 |
| III | KECAMATAN LEMBEYAN | 4,898,649,100 |
| | 1. KEDIREN | 506,202,700 |
| | 2. LEMBEYAN WETAN | 504,795,200 |
| | 3. TUNGGUR | 516,074,300 |
| | 4. DUKUH | 507,670,500 |
| | 5. KEDUNGPANJI | 585,857,400 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---------------------|---------------|
| | 6. NGURI | 573,488,600 |
| | 7. PUPUS | 606,936,800 |
| | 8. TAPEN | 501,369,600 |
| | 9. KROWE | 596,254,000 |
| IV | KECAMATAN TAKERAN | 5,335,644,500 |
| | 1. KIRINGAN | 491,372,800 |
| | 2. DUYUNG | 469,458,100 |
| | 3. TAWANGREJO | 468,433,400 |
| | 4. SAWOJAJAR | 472,637,500 |
| | 5. KUWONHARJO | 495,240,700 |
| | 6. KEPUHREJO | 492,415,400 |
| | 7. KERIK | 487,536,300 |
| | 8. WADUK | 471,096,700 |
| | 9. JOMBLANG | 466,400,600 |
| | 10. KERANG | 510,513,400 |
| | 11. MADIGONDO | 510,539,600 |
| V | KECAMATAN KAWEDANAN | 8,071,643,100 |
| | 1. MANGUNREJO | 479,977,800 |
| | 2. GIRIPURNO | 503,124,900 |
| | 3. NGENTEP | 459,167,400 |
| | 4. BALEREJO | 458,094,400 |
| | 5. GARON | 466,548,800 |
| | 6. TLADAN | 494,210,500 |
| | 7. POJOK | 464,308,100 |
| | 8. NGUNUT | 449,298,400 |
| | 9. TULUNG | 508,344,600 |
| | 10. BOGEM | 449,688,600 |
| | 11. JAMBANGAN | 452,348,600 |
| | 12. SELOREJO | 500,420,800 |
| | 13. SUGIHREJO | 495,847,000 |
| | 14. NGADIREJO | 483,069,100 |
| | 15. KARANGREJO | 483,745,900 |
| | 16. GENENGAN | 468,965,800 |
| | 17. MOJOREJO | 454,482,400 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|-------------------|---------------|
| VI | KECAMATAN MAGETAN | 2,370,516,200 |
| | 1. TAMBAKREJO | 454,179,000 |
| | 2. RINGINAGUNG | 485,752,800 |
| | 3. CANDIREJO | 471,037,200 |
| | 4. BARON | 477,491,400 |
| | 5. PURWOSARI | 482,055,800 |
| VII | KECAMATAN PLAOSAN | 6,587,051,700 |
| | 1. NGANCAR | 486,925,300 |
| | 2. PLUMPUNG | 524,296,800 |
| | 3. PUNTUKDORO | 546,555,800 |
| | 4. BULUGUNUNG | 527,438,500 |
| | 5. BOGOARUM | 484,687,800 |
| | 6. RANDUGEDE | 485,509,200 |
| | 7. SUMBERAGUNG | 474,761,400 |
| | 8. NITIKAN | 463,572,100 |
| | 9. SIDOMUKTI | 508,096,600 |
| | 10. BULUHARJO | 507,987,000 |
| | 11. DADI | 562,107,500 |
| | 12. PACALAN | 536,056,600 |
| | 13. SENDANGAGUNG | 479,057,100 |
| VIII | KECAMATAN PANEKAN | 8,154,970,500 |
| | 1. TERUNG | 471,847,200 |
| | 2. CEPOKO | 497,357,500 |
| | 3. MILANGASRI | 535,570,900 |
| | 4. WATES | 473,975,700 |
| | 5. SIDOWAYAH | 559,458,800 |
| | 6. TANJUNGSARI | 469,034,400 |
| | 7. SUMBERDODOL | 521,294,100 |
| | 8. MANJUNG | 505,318,600 |
| | 9. TAPAK | 495,579,700 |
| | 10. SUKOWIDI | 472,803,900 |
| | 11. BEDAGUNG | 493,425,600 |
| | 12. NGILIRAN | 528,707,400 |
| | 13. JABUNG | 526,755,100 |
| | 14. REJOMULYO | 477,022,600 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--------------------|---------------|
| | 15. TURI | 596,642,900 |
| | 16. BANJAREJO | 530,176,100 |
| IX | KECAMATAN SUKOMORO | 6,092,787,600 |
| | 1. KALANGKETI | 448,117,700 |
| | 2. TAMANAN | 474,383,500 |
| | 3. TAMBAKMAS | 468,622,100 |
| | 4. BANDAR | 450,644,900 |
| | 5. BIBIS | 475,724,200 |
| | 6. SUKOMORO | 462,517,200 |
| | 7. BULU | 456,493,200 |
| | 8. POJOKSARI | 510,994,800 |
| | 9. KEDUNGGUWO | 477,124,400 |
| | 10. KEMBANGAN | 480,754,900 |
| | 11. KENTANGAN | 486,248,900 |
| | 12. BOGEM | 445,901,800 |
| | 13. TRUNENG | 455,260,000 |
| X | KECAMATAN BENDO | 7,171,211,900 |
| | 1. DUKUH | 479,938,300 |
| | 2. BELOTAN | 543,085,600 |
| | 3. PINGKUK | 511,059,000 |
| | 4. TANJUNG | 503,634,100 |
| | 5. TEGALARUM | 474,359,900 |
| | 6. BULAK | 474,153,400 |
| | 7. KINANDANG | 482,279,700 |
| | 8. SOCO | 475,679,400 |
| | 9. LEMAHBANG | 450,716,300 |
| | 10. KLEDOKAN | 445,860,200 |
| | 11. CARIKAN | 450,673,700 |
| | 12. BULUGLEDEG | 437,465,800 |
| | 13. DUWET | 477,050,500 |
| | 14. SETREN | 521,493,000 |
| | 15. KLECO | 443,763,000 |
| XI | KECAMATAN MAOSPATI | 5,575,465,400 |
| | 1. SUGIHWARAS | 489,351,400 |
| | 2. TANJUNGSEPREH | 467,072,700 |

| 1 | 2 | 3 |
|------|----------------------|---------------|
| | 3. GULUN | 467,776,700 |
| | 4. MALANG | 443,953,900 |
| | 5. KLAGENGAMBIRAN | 451,964,500 |
| | 6. PANDEYAN | 458,317,500 |
| | 7. SURATMAJAN | 485,927,700 |
| | 8. RONOWIJAYAN | 425,439,500 |
| | 9. NGUJUNG | 474,392,800 |
| | 10. SUMBEREJO | 482,330,900 |
| | 11. PESU | 479,377,900 |
| | 12. SEMPOL | 449,559,900 |
| XII | KECAMATAN BARAT | 5,601,278,900 |
| | 1. BOGOREJO | 468,258,600 |
| | 2. BANJAREJO | 443,621,300 |
| | 3. KARANGSONO | 462,806,000 |
| | 4. PURWODADI | 455,188,300 |
| | 5. MANJUNG | 483,713,200 |
| | 6. NGUMPUL | 446,636,000 |
| | 7. PANGGUNG | 494,780,700 |
| | 8. BLARAN | 461,590,000 |
| | 9. JONGGRANG | 482,135,200 |
| | 10. REJOMULYO | 460,164,900 |
| | 11. BANGUNASRI | 449,855,200 |
| | 12. KLAGEN | 492,529,500 |
| XIII | KECAMATAN KARANGREJO | 5,009,002,800 |
| | 1. MANTREN | 467,525,800 |
| | 2. GONDANG | 442,749,900 |
| | 3. SAMBEREMBE | 445,193,300 |
| | 4. PATIHAN | 471,145,400 |
| | 5. PELEM | 479,550,200 |
| | 6. BALUK | 459,384,900 |
| | 7. GEBYOG | 465,121,800 |
| | 8. MARON | 434,142,500 |
| | 9. PRAMPELAN | 447,280,500 |
| | 10. GRABAHAN | 436,628,100 |
| | 11. KAUMAN | 460,280,400 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------------|---------------|
| XIV | KECAMATAN KARAS | 5,369,736,400 |
| | 1. KARAS | 491,895,000 |
| | 2. SOBONTORO | 501,817,400 |
| | 3. SUMURSONGO | 481,414,800 |
| | 4. TAJI | 485,589,300 |
| | 5. KUWON | 505,791,200 |
| | 6. JUNGKE | 450,835,300 |
| | 7. TEMBORO | 546,581,300 |
| | 8. TEMENGGUNGAN | 464,521,200 |
| | 9. GEPLAK | 452,180,100 |
| | 10. BOTOK | 470,708,900 |
| | 11. GINUK | 518,401,900 |
| XV | KECAMATAN KARTOHARJO | 5,649,845,900 |
| | 1. KARTOHARJO | 509,178,600 |
| | 2. MRAHU | 447,071,000 |
| | 3. KLURAHAN | 445,577,000 |
| | 4. PENCOL | 457,267,000 |
| | 5. SUKOWIDI | 482,227,000 |
| | 6. NGELANG | 477,021,600 |
| | 7. JAJAR | 479,755,400 |
| | 8. GUNUNGAN | 483,395,600 |
| | 9. JERUK | 454,005,600 |
| | 10. BAYEM WETAN | 469,211,400 |
| | 11. BAYEM TAMAN | 461,600,400 |
| | 12. KARANGMOJO | 483,535,300 |
| XVI | KECAMATAN NGARIBOYO | 5,991,322,000 |
| | 1. SELOTINATAH | 591,445,900 |
| | 2. PENDEM | 479,620,800 |
| | 3. BANGSRI | 489,683,500 |
| | 4. SELOPANGGUNG | 457,690,900 |
| | 5. SUMBERDUKUN | 466,957,300 |
| | 6. BALEASRI | 496,139,500 |
| | 7. BALEGONDO | 498,738,500 |
| | 8. NGARIBOYO | 500,676,700 |
| | 9. MOJOPURNO | 504,277,100 |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|------------------------|-----------------|
| | 10. BANYUDONO | 488,983,500 |
| | 11. BANJARPANJANG | 481,639,600 |
| | 12. BANJAREJO | 535,468,700 |
| XVII | KECAMATAN NGUNTORONADI | 4,240,847,300 |
| | 1. SUKOWIDI | 472,868,700 |
| | 2. SEMEN | 470,802,400 |
| | 3. GORANGGARENG | 458,039,600 |
| | 4. PETUNGREJO | 457,922,800 |
| | 5. NGUNTORONADI | 473,674,700 |
| | 6. SIMBATAN | 494,383,400 |
| | 7. PURWOREJO | 463,980,000 |
| | 8. KENONGOMULYO | 461,545,700 |
| | 9. DRIYOREJO | 487,630,000 |
| XVIII | KECAMATAN SIDOREJO | 5,184,303,800 |
| | 1. SAMBIROBYONG | 486,212,700 |
| | 2. CAMPURSARI | 482,063,300 |
| | 3. KALANG | 496,886,600 |
| | 4. DURENAN | 492,579,100 |
| | 5. SIDOREJO | 522,378,700 |
| | 6. GETASANYAR | 525,012,000 |
| | 7. SIDOMULYO | 673,381,400 |
| | 8. SUMBERSAWIT | 533,811,500 |
| | 9. SIDOKERTO | 489,039,900 |
| | 10. WIDOROKANDANG | 482,938,600 |
| | Total | 101,589,236,000 |

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004